

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan, membandingkan tingkat konsumsi penduduk atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan (BPS, 2012). Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai / mereka yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak untuk kehidupan, kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya di negara-negara sedang berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama tetapi karena sampai detik ini masalah kemiskinan belum juga terselesaikan, masalah ini tidak bisa dianggap sesuatu yang wajar oleh pemerintah karena bila terus dibiarkan masalah kemiskinan ini akan menghambat jalannya pembangunan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 di jelaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dari itu persoalan kemiskinan menjadi salah satu prioritas target kebijakan pembangunan di

Indonesia dan dalam hal ini pemerintah sudah melakukan berbagai macam program untuk mengatasi masalah kemiskinan, diantara beberapa program yang telah terealisasi yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Raskin (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Asuransi Miskin, Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) dan masih banyak program pemerintah yang intinya mengentaskan kemiskinan (Deny :2008).

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik karena hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD 1945 secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal itu berarti hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara menjadi tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu, pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi

seluruh rakyat Indonesia. dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan (Hureirah: 2005).

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar Negara berkembang, persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan kemiskinan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk bahkan ada Negara dalam kondisi sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya, kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi yang ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk, persoalan kemiskinan saat ini bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik juga ideologi dan secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidak mampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, berkaitan dengan sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut (dalam rencana strategis departemen pemukiman dan prasarana wilayah, 2002) menjelaskan bahwa kemiskinan telah menyebabkan dampak yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain:

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat.

4. Menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh yang berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan dan beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses / peningkatan pendidikan masyarakat dan perluasan lapangan kerja (Hureirah; 2005).

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan, kemiskinan alamiah terjadi antara lain karena sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan terjadinya bencana alam sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia sehingga mereka berada dalam lingkaran kemiskinan, dari kondisi itu para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan dan bukan pada pemerataan, adapun program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan di Indonesia tetapi sering kali dalam implementasinya dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan seperti salah sasaran, mengutamakan kelompoknya dan lain sebagainya, kalau kondisi ini terus dibiarkan maka pada gilirannya masyarakat akan semakin jauh dari budaya Indonesia seperti gotong

royong, musyawarah dan kepedulian kepada sesama untuk mengatasi persoalan secara bersama-sama (Widiastuti, 2010).

Wongdesimiwati (2009) menyatakan bahwa secara makro kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya yaitu penduduk miskin memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah, kemiskinan juga terjadi akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, Kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitasnya rendah dan sebagian besar dari mereka berpendapatan rendah karena kualitas sumber daya manusianya juga rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia ini salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan juga terjadi karena tidak seimbangnya antara besarnya angkatan kerja dengan kesempatan kerja, ini terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia sehingga terjadilah pengangguran dan efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dapat dicapai seseorang., semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh segmen dalam masyarakat, setiap Negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat suatu bangsa untuk memajukan bangsanya atau menaikkan kesejahteraan warganya, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengurangi kemiskinan namun pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2010-2013

Tahun	Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur
2010	14,87
2011	13,85
2012	13,08
2013	13,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Tabel diatas menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Timur dari tahun 2010-2013, terlihat bahwa angka kemiskina di Provinsi Jawa Timur sebesar 14,87 persen pada tahun 2010 sementara pada tahun 2011 kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 13,85 persen, pada tahun 2012 angka kemiskinan di Jawa Timur terus turun menjadi sebesar 13,08 persen dan pada tahun 2013 yaitu angka kemiskinan tidak bergerak yaitu sebesar 13,08 persen, penurunan angka kemiskinan pada tahun 2010-2013 di Jawa Timur ini masih tergolong rendah dan perlu upaya-upaya yang serius untuk menurunkan kemiskinan secara cepat.

Semakin tinggi jumlah penduduk miskin di suatu daerah menunjukkan tingginya beban pembangunan di daerah tersebut, oleh sebab itu pembangunan dikatakan berhasil bila jumlah ataupun persentase penduduk miskin akan semakin sedikit, untuk itu pemerintah Jawa Timur dengan program yang sudah ada harus benar-benar berupaya menanggulangi kemiskinan, meskipun disadari bahwa pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil maksimal dan belum sesuai dengan harapan karena kompleksnya masalah kemiskinan disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya kemiskinan.

Tabel 1.2
Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi JATIM 2013

No	Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten		
1	Pacitan	17,29
2	Ponorogo	11,76
3	Trenggalek	14,21
4	Tulungagung	9,40
5	Blitar	10,74
6	Kediri	13,71
7	Malang	11,04
8	Lumajang	12,40
9	Jember	11,81
10	Banyuwangi	9,97
11	Bondowoso	15,81
12	Situbondo	14,34
13	Probolinggo	18,22
14	Pasuruan	11,58
15	Sidoarjo	6,44
16	Mojokerto	10,71
17	Jombang	12,23
18	Nganjuk	13,22
19	Madiun	13,70
20	Magetan	11,50
21	Ngawi	15,99
22	Bojonegoro	16,66
23	Tuban	17,84
24	Lamongan	16,70
25	Gresik	14,35
26	Bangkalan	24,70
27	Sampang	27,97
28	Pamekasan	19,61
29	Sumenep	21,96
Kota		
30	Kediri	8,14
31	Blitar	6,75
32	Malang	5,21
33	Probolinggo	10,92
34	Pasuruan	7,90
35	Mojokerto	6,48
36	Madiun	5,37
37	Surabaya	6,25
38	Batu	4,47
Jawa Timur		13,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Tabel diatas menunjukan bahwa empat Kabupaten di Pulau Madura mendominasi angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur yang mana pada tahun 2013 Kabupaten Sampang menyumbang sebesar 27,97 persen disusul oleh Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 24,70 persen sementara Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 21,96 persen dan yang terakhir yaitu Kabupaten Pamekasan menyumbang kemiskinan sebesar 19,61 persen, tingkat kemiskinan di Pulau Madura mendominasi angka kemiskinan di Jawa Timur untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Madura agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk dan dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk lepas dari jerat kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan ekonomi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan kesejahteraan tersebut. Adapun dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan

meningkatnya peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Dari uraian diatas memberikan suatu pemahaman terhadap pentingnya dilakukan suatu penelitian mengenai kemiskinan di empat Kabupaten di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Pulau Madura Tahun 2005-2013”** mengambil lokasi penelitian di Pulau Madura karena berdasarkan data di atas ke empat Kabupaten ini memberikan sumbangan kemiskinan yang sangat besar terhadap kemiskinan di Jawa Timur disamping itu juga penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi kemiskinan pasca pembangunan jembatan suramadu, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat bahwa ke empat Kabupaten di Pulau Madura merupakan salah satu Kabupaten yang perlu ditangani dengan segera karena dari jumlah kemiskinan yang sangat tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di Pulau Madura yang tergolong miskin, hal ini merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan karena akan menimbulkan permasalahan dalam proses pembangunan, adapun besarnya angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama indeks pembangunan manusia, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Pulau Madura pada tahun 2005-2013?.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Pulau Madura pada tahun 2005-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan di Pulau Madura.
2. Semakin banyaknya penelitian yang berkaitan dengan masalah kemiskinan akan semakin terbuka informasi dan cara-cara yang efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Pulau Madura dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan / dijadikan kerangka penilaian kearah pembangunan dalam memecahkan masalah kemiskinan di Pulau Madura.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi variabel-variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu Indeks pembangunan Manusia, Tingkat pengangguran dan Pertumbuhan ekonomi, penelitian ini mencakup periode 9 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini akan menganalisis kemiskinan di Pulau Madura yang terdiri dari 4 Kabupaten. Data yang berkaitan dengan kemiskinan dibatasi hanya untuk empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura saja yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan dan secara garis besar kerangka pembahasan masing- masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada, Landasan teori ini diperoleh selama masa perkuliahan maupun literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai dasar pedoman

penelitian dan bagian selanjutnya mengenai tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bagian akhir dari bab ini adalah hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, adapun bagian-bagian dari metode penelitian tersebut terdiri dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi inti dari penulisan skripsi, yang berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis, adapun bagian-bagian dari bab ini antara lain yaitu gambaran umum dari obyek penelitian, hasil pengujian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini dan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan serta saran yang dianggap perlu yang berkenaan dengan pembahasan skripsi.